

# RENCANA STRATEGIS

# Renstra

2015-2019

Perwakilan BkkbN Provinsi Riau



**AYO IKUT KB**  
2 Anak Cukup

**RENCANA STRATEGIS  
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
PROVINSI RIAU  
TAHUN 2015-2019**



**BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
PROVINSI RIAU  
TAHUN 2019**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmatNYA Kegiatan Rencana Strategis Perwakilan BKKBN Provinsi Riau Tahun 2014-2019 dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu kepada amanat Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan juga rencana strategis program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga secara nasional yang telah disusun oleh BKKBN Pusat.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pada Pasal 56 Ayat (1), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memiliki tugas melaksanakan Pengendalian Penduduk dan menyelenggarakan Keluarga Berencana. Kemudian untuk melaksanakan tugas tersebut, pada Pasal 56 ayat (2) BKKBN mempunyai fungsi antara lain a). perumusan kebijakan nasional; b). penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK); c). pelaksanaan advokasi dan koordinasi; d). penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi; e). penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi; dan f). pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi di Bidang Pengendalian Penduduk dan penyelenggaraan Keluarga Berencana.

Dalam melaksanakan fungsi perumusan kebijakan nasional, BKKBN mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahap III periode tahun 2015-2019, dimana sasaran-sasaran yang harus dicapai dalam Pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB telah ditetapkan. Sasaran RPJMN tersebut harus dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan dan strategi implementasinya melalui berbagai output, indikator, komponen dan sub komponen pada Rencana Strategis (Renstra) BKKBN tahun 2015-2019.

Mempertimbangkan berbagai isu strategis yang berkembang saat ini, khususnya perubahan pendekatan dari *money follow function* menjadi *money follow program*, serta perubahan pendekatan perencanaan pembangunan nasional yang holistik, tematik, terintegrasi, dan spasial, maka perlu dilakukan beberapa penyesuaian pada Renstra BKKBN 2015-2019 yang sebelumnya telah disusun dan ditetapkan melalui Peraturan Kepala BKKBN Nomor: 212/PER/B1/2015 tanggal 11 Juni 2015. Lebih lanjut dalam penyesuaiannya, BKKBN telah terlebih dahulu melakukan penyempurnaan pada *Strategy Map* BKKBN *wide* dan BSC (*Balanced Score Card*) BKKBN. BSC BKKBN merupakan salah satu alat untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja di lingkungan BKKBN, sehingga diharapkan berbagai indikator kinerja yang tertuang di dalam Renstra dapat tercapai dengan optimal.

Revisi Renstra BKKBN 2015-2019 ini secara umum tidak merubah Sasaran Pembangunan dan indikator-indikator utama yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019. Revisi lebih diarahkan untuk mempertajam strategi pelaksanaan Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) agar dapat diimplementasikan dengan lebih efektif dan efisien, memiliki daya ungkit terhadap upaya pencapaian target/sasaran, berkontribusi secara langsung terhadap upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia (Nawa Cita kelima), serta dapat selalu dipantau perkembangannya dan dipertanggungjawabkan pelaksanaannya secara *in-line* dari RPJMN, Renstra, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja (Renja), Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK), sampai dengan Rencana Kerja Anggaran-Kementerian/Lembaga (RKA-K/L).

Berkenaan dengan adanya ketentuan baru dalam pemrograman dan penganggaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamatkan penerapan penganggaran berbasis kinerja, anggaran terpadu, dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM), maka revisi Renstra BKKBN 2015-2019 mengacu pada ketiga pendekatan tersebut. Selanjutnya, terkait dengan perubahan kewenangan pemerintah sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, BKKBN juga harus melakukan beberapa penyesuaian pada Renstra.

Revisi Renstra BKKBN 2015-2019 ini telah melalui beberapa langkah penyempurnaan dengan melakukan beberapa penyesuaian dan penajaman pada sasaran, outcome/Output, kegiatan, IKK, Komponen dan Sub Komponen dengan melibatkan seluruh komponen internal di lingkungan BKKBN. Selanjutnya dalam implementasinya melalui Renja, ADIK dan RKA-K/L ke depan, diharapkan seluruh Unit Kerja di lingkungan BKKBN dapat mengacu pada dokumen Renstra BKKBN 2015-2019 hasil revisi ini.

Akhirnya, dengan segala upaya dari seluruh jajaran BKKBN, kami berharap agar seluruh target sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Renstra BKKBN 2015-2019 ini dapat tercapai sehingga akan menggambarkan suksesnya implementasi program KKBPK secara utuh dan menyeluruh di semua tingkatan wilayah.

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
PROVINSI RIAU,



**Drs. Agus P. Proklamasi, MM**



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Kondisi Umum .....	1
1.2 Potensi dan permasalahan.....	4
<b>BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS BKKBN .....</b>	<b>11</b>
2.1 Visi .....	11
2.2 Misi .....	11
2.3 Tujuan BKKBN.....	12
2.4 Sasaran Strategis BKKBN .....	12
<b>BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN .....</b>	<b>14</b>
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional .....	14
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BKKBN.....	15
3.3 Kerangka Regulasi .....	19
3.4 Kerangka Kelembagaan .....	23
<b>BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .....</b>	<b>26</b>
4.1 Target Kinerja.....	26
4.2 Kerangka Pendanaan .....	30
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>33</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
Lampiran 1 : Matriks Rencana Strategis BKKBN .....	35
Lampiran 2 : Matriks Kerangka Regulasi .....	



# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Kondisi Umum**

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta meningkatkan kualitas generasi mendatang untuk mensukseskan pembangunan. Terdapat dua hal utama yang perlu diperhatikan dalam membahas integrasi penduduk dan pembangunan. Pertama, bahwa penduduk tidak hanya diperlakukan sebagai obyek tetapi juga subyek yang berpartisipasi penuh dalam pembangunan. Kedua, ketika penduduk memiliki peran sebagai subyek pembangunan, maka diperlukan upaya pemberdayaan untuk meningkatkan kapasitas penduduk dalam pembangunan. Hal ini menyangkut “pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas”.

Sesuai dengan arah pembangunan Pemerintahan periode 2015-2019, Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Riau merupakan salah satu Kementerian/Lembaga (K/L) yang berada di Provinsi sebagai perpanjangan tangan BKKBN Republik Indonesia diberi mandat untuk mewujudkan Agenda Pembangunan Nasional (Nawa Cita), terutama pada Cita ke-5 (lima) yaitu “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia” melalui Pembangunan Bidang Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana. Kemudian di dalam Strategi Pembangunan Nasional 2015-2019 (Dimensi Pembangunan), Perwakilan BKKBN Provinsi Riau berada pada Dimensi Pembangunan Manusia, yang didalamnya berperan serta pada upaya mensukseskan Dimensi Pembangunan



Kesehatan serta Mental/Karakter (Revolusi Mental).

Selanjutnya, terkait dengan integrasi penduduk dengan pembangunan diperlukan penguatan kebijakan dalam pembangunan berwawasan kependudukan. Secara garis besar, pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada, dimana penduduk harus dijadikan titik sentral dalam proses pembangunan. Penduduk harus dijadikan subyek dan obyek dalam pembangunan, dimana pembangunan dilaksanakan oleh penduduk dan untuk penduduk. Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan, Perwakilan BKKBN Provinsi Riau harus dapat memperkuat pelaksanaan Pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB beserta penjabarannya ke dalam program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dengan berbagai kegiatan prioritasnya, baik dari sisi pengendalian kuantitas penduduk (perubahan jumlah, struktur, komposisi dan persebaran penduduk yang seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan), maupun dari sisi peningkatan kualitasnya (melalui kontribusi terhadap upaya perwujudan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera).

Perkembangan selanjutnya pada tahun 2016, dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017, Kementerian PPN/Bappenas mengembangkan program dan kegiatan prioritas pada rancangan Pembangunan Nasional. Posisi Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di dalam RKP tahun 2017 berada pada lingkup Prioritas Nasional Pembangunan Kesehatan. Perwakilan BKKBN Provinsi Riau memiliki kontribusi pada Pembangunan Kesehatan melalui “Peningkatan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi” dengan dukungan dan kontribusi Kementerian, Lembaga serta Mitra Kerja terkait lainnya baik yang ada di Pusat maupun yang ada di daerah. Pada program prioritas “Peningkatan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi”, Perwakilan BKKBN Provinsi Riau harus fokus pada pelaksanaan 5 (lima) kegiatan prioritas RKP 2017, yaitu: <sup>1)</sup> Pelayanan KB, <sup>2)</sup> Advokasi dan KIE KKBPK, <sup>3)</sup> Pembinaan

Remaja, <sup>4)</sup> Pembangunan Keluarga, dan <sup>5)</sup> Regulasi, Kelembagaan, serta Data dan Informasi. Kelima kegiatan prioritas tersebut juga harus menjadi salah satu pertimbangan dalam pengembangan rancangan program dan kegiatan prioritas di dalam revisi Renstra Perwakilan BKKBN Provins Riau 2015-2019.

Beberapa aspek penting lainnya yang harus menjadi perhatian dalam perumusan arah kebijakan dan strategi melalui pengembangan indikator kinerja dan pengembangan kegiatan prioritas beserta aspek pembiayaannya, adalah;

- Perubahan pendekatan perencanaan yang semula bersifat *money follow function* diubah menjadi *money follow program*. Dalam hal ini bahwa dari sisi pembiayaan, tidak seluruh fungsi harus dibiayai secara merata, melainkan harus selektif dengan mempertimbangkan prioritas program dan kegiatannya. Kementerian/Lembaga (K/L) harus dapat memangkas program yang nomenklturnya tidak jelas dan mengutamakan pembiayaan untuk program/kegiatan yang memiliki daya ungkit terhadap upaya pencapaian target/sasaran dan memiliki manfaat yang secara langsung dapat diterima oleh masyarakat.
- Perubahan pendekatan perencanaan pembangunan nasional yang holistik, tematik, terintegrasi, dan spasial. Dalam konteks pendekatan holistik, Program KKBPk harus dapat dilaksanakan dengan mobilisasi seluruh potensi dan sumber daya, baik di lingkungan BKKBN maupun bersama-sama dengan Pemangku Kepentingan dan Mitra Kerja di seluruh tingkatan wilayah. Pada pendekatan tematik, Program KKBPk akan difokuskan pada tema sesuai Sasaran Pembangunan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang telah ditetapkan dalam RPJMN. Pada pendekatan terintegrasi, Perwakilan BKKBN Provinsi Riau mengembangkan keterpaduan dan sinergitas program dan kegiatan lintas sektor Program KKBPk baik dengan Pemangku Kepentingan maupun dengan Mitra Kerja di semua tingkatan wilayah. Selanjutnya terkait dengan pendekatan spasial, Program KKBPk akan lebih difokuskan pada wilayah kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan atau wilayah

tertentu yang menjadi prioritas.

- Memperhatikan pendekatan penganggaran yang berbasis kinerja, terpadu (unified budgeting), serta mengacu pada Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). Dalam konteks penganggaran berbasis kinerja, secara umum pengeluaran anggaran harus dapat dikaitkan dengan hasil (output) dari kegiatan yang telah dibiayai. Terkait dengan penganggaran terpadu, Perwakilan BKKBN Provinsi Riau harus mampu mengintegrasikan perencanaan anggaran untuk seluruh jenis belanja guna mencapai hasil (output) kegiatan. Kemudian dari sisi KPJM, penetapan penganggaran berdasarkan kebijakan implikasi anggaran dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun anggaran, atau dapat memperkirakan implikasi anggaran sesuai peta kerja (road map) dalam pengembangan program dan kegiatan di masa yang akan datang.

Selain itu, dalam pengembangan indikator kinerja dan kegiatan-kegiatan prioritas juga telah mempertimbangkan aspek pemantauan dan evaluasinya. Keterkaitan antara Sasaran dan Indikator RPJMN, Renstra, untuk kemudian secara tahunan dapat mengakomodir Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Renja K/L, serta penguangannya dalam berbagai kegiatan prioritas dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) harus jelas dan dapat selalu dievaluasi perkembangannya. Dari sisi pemantauan kinerja, untuk memastikan setiap indikator telah diukur dan terdokumentasikan dengan baik, maka pada setiap awal tahun berjalan dilakukan penandatanganan perjanjian kinerja antara Kepala BKKBN dan Unit Kerja Eselon I. Sedangkan untuk Unit Kerja Eselon II, baik pusat maupun provinsi, dilakukan penandatanganan kontrak kinerja antara Kepala BKKBN dengan seluruh Eselon II. Perjanjian kinerja dan kontrak kinerja tersebut, merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja yang menjadi lingkup fungsi dan tugas BKKBN terhadap masyarakat.

## **1.2 Potensi dan permasalahan**

Beberapa perubahan lingkungan strategis, seperti perubahan dari sisi pendekatan perencanaan pembangunan nasional yang telah dijabarkan pada sub-bab sebelumnya, pengembangan program dan kegiatan prioritas pada

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017, serta adanya perkembangan peraturan perundangan, juga menjadi dasar potensi pengembangan/penyempurnaan arah kebijakan, strategi dan kegiatan prioritas pada Renstra Perwakilan BKKBN Provinsi Riau 2015-2019 ini.

Terkait dengan potensi pengembangan program/kegiatan yang mengadopsi kerangka program prioritas pada RKP 2017, Perwakilan BKKBN Provinsi Riau memiliki potensi untuk lebih berkontribusi pada Pembangunan Kesehatan melalui “Peningkatan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi”. Pengembangan yang dilakukan dapat dilakukan melalui perumusan berbagai kegiatan yang secara langsung terkait dengan 5 (lima) kegiatan prioritas: <sup>1)</sup> Pelayanan KB, <sup>2)</sup> Advokasi dan KIE KKBPK, <sup>3)</sup> Pembinaan Remaja, <sup>4)</sup> Pembangunan Keluarga, dan <sup>5)</sup> Regulasi, Kelembagaan, serta Data dan Informasi. Pengembangannya dapat dilakukan baik pada level komponen maupun pada level sub komponen untuk dituangkan di dalam Renstra Perwakilan BKKBN Provinsi Riau 2015-2019.

Lebih lanjut terkait Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang kewenangannya secara konkuren telah dibagi menjadi 4 (empat) Sub Urusan yang telah diatur pembagian kewenangannya antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pengembangan pada Renstra Perwakilan BKKBN Provinsi Riau 2015-2019 ini juga harus dapat mengakomodir berbagai kegiatan prioritas yang mempertimbangkan sinergitas dari 4 (empat) Sub Urusan yang menjadi kewenangan bersama, yaitu; <sup>1)</sup> Pengendalian Penduduk, <sup>2)</sup> Keluarga Berencana (KB), <sup>3)</sup> Keluarga Sejahtera, serta<sup>4)</sup> Standarisasi Pelayanan KB dan Sertifikasi Tenaga Penyuluh KB (PKB/PLKB). Pengembangan detail pelaksanaan Sub Urusan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah RI (PP) Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Perubahan lingkungan strategis yang juga harus mendapat perhatian dalam penajaman Program KKBPK di lini lapangan, diantaranya terkait otonomi

daerah. Langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan rentang kendali manajemen pelayanan Program KKBPK antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, diantaranya melalui:

- 1) Ketersediaan instrumen regulasi yang mendukung penuangan program dan kegiatan Pembangunan Bidang Kependudukan dan KB ke dalam program dan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Ketersediaan rancang bangun program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang tertuang dalam Arah Kebijakan Umum Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Daerah (Renstrada), serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 3) Penguatan kelembagaan Pengendalian Penduduk dan KB di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 4) Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta optimalisasi fungsi PPKBD dan Sub-PPKBD (Kader) sebagai ujung tombak pelaksana Program KKBPK di lini lapangan.

Jika keempat hal tersebut dapat diintegrasikan dengan baik, maka dapat dipastikan bahwa penyelenggaraan program KKBPK di lini lapangan dapat berjalan dengan efektif dan efisien dalam mencapai target/sasaran yang telah ditetapkan, serta dapat memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat Indonesia.

Beberapa isu strategis dan permasalahan pengendalian kuantitas penduduk, sebagaimana tertuang didalam RPJMN 2015-2019 Buku II (Bab II – Bidang Sosial budaya) yang harus mendapat perhatian khusus adalah:

- a. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang Merata untuk dapat mengatasi permasalahan pelayanan KB, antara lain: (1) Angka pemakaian kontrasepsi cara modern mengalami fluktuasi, yaitu dari sebesar 55,7 persen pada tahun 2002 turun menjadi sebesar 52,8 persen pada tahun 2007, dan pada tahun 2012 meningkat menjadi sebesar 54,1 persen.

Sedangkan pada tahun 2015 sebesar 54,4 persen (Susenas 2015); (2) Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) masih tinggi, yaitu sebesar 9,1 persen atau 11,8 persen apabila dengan menggunakan metode formulasi baru; (3) Tingkat putus pakai penggunaan kontrasepsi masih tinggi, yaitu persen; (4) Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) masih rendah yaitu 8,5 persen (SDKI, 2012) (5) Kualitas pelayanan KB (supply side) belum sesuai standar, yaitu berkaitan dengan ketersediaan dan persebaran fasilitas kesehatan/klinik pelayanan KB, ketersediaan dan persebaran tenaga kesehatan yang kompeten dalam pelayanan KB, kemampuan bidan dan dokter dalam memberikan penjelasan tentang pilihan metode KB secara komprehensif termasuk mengenai efek samping alokon dan penanganannya, serta komplikasi dan kegagalan; (6) Jaminan pelayanan KB belum seluruhnya terpetakan pada fasilitas pelayanan KB, terutama dalam rangka sinkronisasi dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Kesehatan.

- b. Penguatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) pelaksanaannya masih dihadapkan dengan beberapa permasalahan antara lain: (1) Masih lemahnya komitmen dan dukungan para pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap program KKBPK terutama yang terkait dengan kelembagaan, kebijakan, perencanaan program dan penganggaran; (2) Masih tingginya jumlah anak ideal yang diinginkan dari setiap keluarga, yaitu sekitar atau 2,8 anak untuk wanita pernah kawin umur 15 – 49 tahun dan 3,2 anak menurut pria kawin umur 15 – 54 tahun di atas angka kelahiran total sebesar 2,9 (SDKI 2012), angka ini belum mengalami peningkatan jika dibandingkan SDKI 2007 yang hanya 2,7 anak per wanita usia subur. (3) Masih terjadinya kesenjangan dalam memperoleh informasi tentang program KKBPK baik antar Kabupaten/Kota, antara wilayah perdesaan-perkotaan maupun antar tingkat pendidikan dan pengeluaran keluarga; (4) Muatan dan pesan dalam advokasi dan KIE masih perlu untuk terus dikembangkan; serta (5) Peran tenaga lapangan KB dalam konseling KB belum optimal. Berdasarkan data SDKI 2012, hanya sebesar 6,3 persen wanita kawin yang dikunjungi petugas lapangan KB dan berdiskusi tentang KB,



sedangkan 3,5 persen wanita kawin tidak berdiskusi tentang KB dengan petugas KB atau provider.

- c. Peningkatan pemahaman dan kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga. Hal sangat penting dalam upaya mengendalikan jumlah kelahiran dan menurunkan resiko kematian Ibu melahirkan. Permasalahan kesehatan reproduksi remaja, antara lain: (1) Angka kelahiran pada perempuan remaja usia 15-19 tahun di Provinsi Riau masih tinggi, yaitu 42 per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (SDKI 2012), dan remaja perempuan 15-19 tahun (SDKI 2012); (2) Masih banyaknya perkawinan usia muda, ditandai dengan median usia kawin pertama perempuan kurang dari 16 tahun adalah sebesar 3,42 persen sementara yang menikah usia 16 – 188 tahun adalah sebesar 18,8 persen (usia ideal pernikahan menurut kesehatan reproduksi adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi pria); (3) terdapat kesenjangan dalam pembinaan pemahaman remaja tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) yang tergambar pada tingkat kelahiran remaja (angka kelahiran remaja kelompok usia 15-19 tahun); (4) Tingginya perilaku seks pra nikah di sebagian kalangan remaja, berakibat pada kehamilan yang tidak diinginkan masih tinggi; (5) Pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi dan perilaku beresiko masih rendah.
- d. Pembangunan keluarga melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran fungsi keluarga. Dalam rangka pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pembinaan kelestarian kesertaan ber-KB masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, antara lain: (1) Masih tingginya jumlah keluarga miskin, yaitu sebesar 69,19 persen dari sebanyak 1.028.781 keluarga di Provinsi Riau (Keluarga Pra Sejahtera/KPS sebesar 15,8 persen dan Keluarga Sejahtera I/KS-1 sebesar 53,36 persen (Pendataan Keluarga, BKKBN 2015); (2) Terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan konseling ketahanan dan kesejahteraan keluarga; (3) Pelaksanaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga akan peran dan fungsi kelompok kegiatan belum optimal dalam mendukung pembinaan kelestarian kesertaan ber-KB. Disamping itu, Kelompok Kegiatan (Poktan), yang terdiri dari: Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga

- Lansia (BKL) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) belum optimal dalam memberikan pengaruh kepada masyarakat akan pentingnya ber-KB/pelestarian Peserta KB Aktif (PA); dan (4) Terbatasnya materi program KKBPK dalam kelompok kegiatan serta terbatasnya jumlah dan kualitas kader/tenaga kelompok kegiatan.
- e. Penguatan landasan hukum dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pembangunan bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB). Penguatan landasan hukum dan penyerasian kebijakan Pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB memiliki beberapa permasalahan, antara lain: (1) Belum seluruh kebijakan perencanaan program dan penganggaran yang terkait dengan bidang Pengendalian Penduduk dan KB dimasukkan dalam perencanaan daerah (Indikator pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB dalam RPJMN dan Renstra BKKBN ke dalam RPJMD dan Renstrada Provinsi dan Kabupaten/Kota); (2) Koordinasi pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB dengan program pembangunan lainnya masih lemah (antara lain; koordinasi dengan program bantuan pemerintah seperti Program Keluarga Harapan/PKH, Jamkesmas/Jamkesda, Jampersal, PNPM, dan SJSN Kesehatan),sertaperlunya penguatan koordinasi pelaksanaan kegiatan Bidang KKB lintas sektor (misal: Kegiatan Kampung KB).
- f. Penguatan Data dan Informasi Kependudukan, KB dan KS. Terdapat beberapa sumber data pembangunan kependudukan, KB dan KS, diantaranya administrasi kependudukan yang mencatat registrasi penduduk dan registrasi vital; sensus penduduk dan beberapa survei terkait bidang kependudukan dan KB; serta data sektoral pembangunan kependudukan dan KB termasuk data-data kajian dan evaluasi pembangunan Kependudukan dan KB. Data Sektoral memegang peranan penting dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan bidang KKB. Namun, data sektoral yang diperoleh melalui statistik rutin pendataan kependudukan, KB, dan keluarga belum dapat digunakan secara optimal dalam pengawasan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi program KKBPK, dikarenakan sistem pengolahan data masih kurang berkualitas.

Beberapa isu strategis dan permasalahan pengendalian kuantitas penduduk

sebagaimana dijabarkan diatas sesuai dengan 5 (lima) kegiatan prioritas yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017: <sup>1)</sup> Pelayanan KB, <sup>2)</sup> Advokasi dan KIE KKBPK, <sup>3)</sup> Pembinaan Remaja, <sup>4)</sup> Pembangunan Keluarga, dan <sup>5)</sup> Regulasi, Kelembagaan, serta Data dan Informasi. Sehingga upaya-upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut harus benar-benar dapat digambarkan didalam perbaikan/revisi Rencana Strategis (Renstra) Perwakilan BKKBN Provinsi Riau 2015-2019 ini.

Pengembangan cakupan penggarapan Program KKBPK diantaranya juga dapat dilakukan melalui Program Tematik dan Program/kegiatan Direktif Presiden. Terkait dengan program tematik, Perwakilan BKKBN Provinsi Riau dapat berkontribusi dari sisi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang secara umum dapat diintegrasikan dengan berbagai kegiatan dalam lingkup peningkatan kualitas Kesehatan Reproduksi, Advokasi dan KIE Program KKBPK, lingkup pembinaan Keluarga Balita dan Anak, pembinaan Ketahanan Remaja, lingkup peningkatan kesertaan ber-KB di wilayah dan sasaran khusus (Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan/DTPK), lingkup penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan KKBPK, serta lingkup pengelolaan Program KKBPK di Perwakilan BKKBN Provinsi. Selain itu, Perwakilan BKKBN Provinsi Riau juga berkontribusi pada program tematik peningkatan Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST). Dalam hal ini Perwakilan BKKBN Provinsi Riau dapat berkontribusi dalam pengembangan program kerjasama dan studi di negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim yang maju dalam Program KKBPK (misal: Pakistan, Iran, Mesir). Kegiatan dukungan KSST masuk dalam kegiatan Pengembangan Kerja Sama Internasional Kependudukan dan Keluarga Berencana.

Potensi yang juga dapat dikembangkan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Riau melalui Program/kegiatan Direktif Presiden adalah “Kampung KB”. Kampung KB merupakan salah satu potensi utama yang dapat memperkuat implementasi Program KKBPK di lini lapangan serta dapat menjadi jembatan integrasi kegiatan antara BKKBN dengan lintas Kementerian/Lembaga dan lintas sektor (Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota).



## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BKKBN**

Berbagai tingkatan dalam penuangan Rencana Strategis (Renstra) BKKBN 2015-2019, baik pada level sasaran program (outcome), sasaran kegiatan (output), Indikator RPJMN, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), level komponen maupun pada level sub komponen sekalipun, harus dirumuskan dengan memperhatikan keterkaitannya pada Visi dan Misi Pemerintah (Kabinet Kerja) periode 2015-2019. Berdasarkan hal tersebut, kemudian disusun tujuan dan sasaran strategis lembaga BKKBN yang mengerucut pada upaya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah.

#### **2.1 Visi Pembangunan 2015-2019**

Sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah (Kabinet Kerja) 2015-2019, seluruh Kementerian/Lembaga diarahkan untuk turut serta mensukseskan Visi dan Misi Pembangunan 2015-2019, dimana Visi Pemerintah untuk 5 (lima) tahun ke depan adalah untuk “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

#### **2.2 Misi Pembangunan 2015-2019**

Sebagaimana tertera dalam RPJMN 2015-2019, untuk mewujudkan Visi di atas adalah melalui 7 Misi Pembangunan, yaitu:

- 1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
- 2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan Negara Hukum;
- 3) Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
- 4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju

- dan sejahtera;
- 5) Mewujudkan Indonesia yang berdaya saing;
  - 6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan
  - 7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Upaya perwujudan Visi dan Misi Pembangunan tersebut, telah disusun strategi pembangunan nasional, diantaranya melalui norma pembangunan untuk membangun dan meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat, serta untuk meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, dan produktifitas dengan memberikan perhatian khusus pada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah ke bawah guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini kemudian didukung dengan fokus pada 3 (tiga) Dimensi Pembangunan, yaitu: 1) Dimensi Pembangunan Manusia dan Masyarakat; 2) Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan; 3) Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan. Dalam hal ini BKKBN masuk di dalam Dimensi Pembangunan yang pertama “Dimensi Pembangunan Manusia dan Masyarakat”.

### **2.3 Tujuan BKKBN**

Dengan berpedoman pada arah pembangunan Pemerintahan sebagaimana tertera dalam Buku I - RPJMN 2015-2019, BKKBN berkomitmen untuk berkontribusi dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Pembangunan sebagaimana dijabarkan di atas dengan perumusan tujuan untuk “mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang melalui upaya penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan perwujudan Keluarga Berkualitas”.

### **2.4 Sasaran Strategis BKKBN**

Untuk memastikan tujuan BKKBN dapat tercapai, maka ditetapkan sasaran strategis BKKBN 2015-2019 yang sesuai dengan Sasaran Pembangunan Kependudukan dan KB yang tertera pada RPJMN 2015-2019, yaitu:

1. Menurunnya Angka kelahiran total (TFR)



2. Meningkatnya prevalensi kontrasepsi (CPR) modern
3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
4. Meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
5. Menurunnya Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi

Ke-5 (lima) Sasaran Strategis tersebut kemudian akan dijabarkan di dalam Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang akan dicapai melalui Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan. Kemudian dalam implementasi upaya pencapaiannya dijabarkan pada level komponen sebagai penghubung dalam penyuangan berbagai kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L).

**BAB III**  
**ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI**  
**DAN KELEMBAGAAN**

**3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional**

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional dalam Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana yang tertera pada Buku I RPJMN 2015-2019 dan yang akan menjadi fokus dalam pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana selama lima tahun ke depan adalah:

1. Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang merata dan berkualitas.
2. Penyediaan sarana dan prasarana serta jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi (Alokon) yang memadai di setiap fasilitas kesehatan KB dan jejaring pelayanan, serta pendayagunaan fasilitas kesehatan untuk pelayanan KB.
3. Peningkatan pelayanan KB dengan penggunaan MKJP untuk mengurangi resiko *drop-out* maupun penggunaan non MKJP dengan memberikan informasi secara berkesinambungan untuk keberlangsungan kesertaan ber-KB serta pemberian pelayanan KB lanjutan dengan mempertimbangkan prinsip Rasional, Efektif dan Efisien (REE).
4. Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB dan tenaga kesehatan pelayanan KB, serta penguatan lembaga di tingkat masyarakat untuk mendukung pergerakan dan penyuluhan KB.
5. Advokasi program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga kepada para pembuat kebijakan, serta promosi dan pergerakan kepada masyarakat dalam penggunaan alat dan obat kontrasepsi KB.
6. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja melalui pendidikan, sosialisasi mengenai pentingnya Wajib Belajar 12 tahun dalam rangka pendewasaan usia perkawinan, dan

peningkatan intensitas layanan KB bagi pasangan usia muda guna mencegah kelahiran di usia remaja.

7. Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui kelompok kegiatan bina keluarga dalam rangka melestarikan kesertaan ber-KB dan memberikan pengaruh kepada keluarga calon akseptor untuk ber-KB.
8. Penguatan tata kelola pembangunan kependudukan dan KB melalui penguatan landasan hukum, kelembagaan, serta data dan informasi kependudukan dan KB.
9. Penguatan Bidang KKBPK melalui penyediaan informasi dari hasil penelitian/kajian Kependudukan, Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga serta peningkatan kerjasama penelitian dengan universitas terkait pengembangan Program KKBPK.

### **3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Perwakilan BKKBN Provinsi Riau**

Arah kebijakan dan strategi Perwakilan BKKBN Provinsi Riau dalam menyelenggarakan pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam periode lima tahun ke depan adalah:

- 1. Peningkatan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas**, yang dilakukan melalui strategi:
  - a. Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB yang merata dan berkualitas, baik lintas sektor maupun lintas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, terutama dalam sistem SJSN Kesehatan dengan menata fasilitas pelayanan KB (kemudahan akses terhadap fasilitas pelayanan KB di setiap tingkatan wilayah);
  - b. Peningkatan penggerakan pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
  - c. Peningkatan Jaminan ketersediaan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) – melalui pengadaan dan distribusi alokon (supply chain management);
  - d. Peningkatan kualitas fasilitas pelayanan KB melalui penyediaan sarana pelayanan KB yang memadai;
  - e. Peningkatan pelayanan akseptor KB, baik secara statis pada fasilitas kesehatan (Faskes) yang melayani KB, dan pelayanan KB

secara *mobile* di wilayah sulit (Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan/DTPK);

- f. Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB (PLKB) dan tenaga medis pelayanan KB (dokter bidan), serta penguatan lembaga di tingkat masyarakat untuk mendukung penggerakan dan penyuluhan KB;
- g. Peningkatan promosi dan konseling Kesehatan dan Hak-hak Reproduksi;
- h. Penguatan konsep kemandirian ber-KB melalui peningkatan kualitas alat dan obat kontrasepsi produksi dalam negeri untuk meningkatkan kemandirian, pengembangan Advokasi dan KIE KB Mandiri serta pengembangan dalam kemandirian mengikuti SJSN Kesehatan.

**2. Penguatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) KKBPK, yang dilakukan melalui strategi:**

- a. Penguatan kebijakan dan pengembangan strategi Advokasi dan KIE tentang Program KKBPK yang sinergi, baik lintas sektor maupun lintas Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. Peningkatan Advokasi dan KIE Program KKBPK (media, audiensi dan momentum) kepada Mitra Kerja dan Pemangku Kepentingan (stakeholders) di seluruh tingkatan wilayah;
- c. Peningkatan Advokasi dan KIE Program KKBPK melalui berbagai media massa dan media luar ruang serta intensifikasi Advokasi dan KIE melalui media lini bawah (below the line);
- d. Peningkatan Advokasi dan KIE Program KKBPK melalui tenaga lini lapangan (PKB/PLKB dan PPKBD/Sub PPKBD), serta peningkatan peran serta aktif masyarakat dengan memperhatikan sasaran target yang disesuaikan dengan karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi;
- e. Peningkatan penggerakan mekanisme operasional lini lapangan Program KKBPK, baik dari PKB/PLKB ke PPKBD/Sub PPKBD, maupun dari PPKBD/Sub PPKBD ke masyarakat.

**3. Peningkatan Pembinaan Ketahanan Remaja, yang dilakukan melalui strategi:**

- a. Peningkatan kebijakan dan strategi yang komprehensif dan terpadu, antar sektor dan antara pusat dan daerah, tentang KIE dan konseling Kesehatan Reproduksi Remaja dengan melibatkan orang tua, teman sebaya, toga/toma, sekolah, dengan memperhatikan perubahan paradigma masyarakat akan pemahaman nilai-nilai pernikahan dan pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja;
  - b. Peningkatan fungsi dan peran, serta kualitas dan kuantitas kegiatan kelompok remaja (PIK KRR) dengan mendorong remaja untuk mempunyai kegiatan yang positif dengan meningkatkan status kesehatan, memperoleh pendidikan, dan meningkatkan jiwa kepemimpinan;
  - c. Peningkatan pembinaan remaja tentang Generasi Berencana (GenRe);
  - d. Pengembangan dan peningkatan fungsi dan peran kegiatan kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) sebagai wahana untuk meningkatkan kepedulian keluarga dan pengasuhan kepada anak - anak remaja mereka.
- 4. Peningkatan Pembangunan Keluarga**, yang dilakukan melalui strategi:
- a. Penguatan kebijakan dan pengembangan strategi dan materi yang relevan tentang pemahaman orangtua mengenai pentingnya keluarga dan pengasuhan tumbuh kembang anak, melalui: pendidikan, penyuluhan, pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak dengan melibatkan tenaga lapangan, kader, dan masyarakat;
  - a. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya Keluarga Berencana (KB) dalam peningkatan kesejahteraan keluarga;
  - b. Peningkatan penyuluhan tentang pemahaman keluarga/orangtua mengenai pentingnya keluarga dalam peran dan fungsi Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL, dan UPPKS), serta penguatan 8 (delapan) fungsi keluarga (agama, sosial, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, pendidikan, ekonomi dan lingkungan);

c. Peningkatan kapasitas tenaga lapangan dan kader serta kelembagaan pembinaan keluarga dalam hal penyuluhan tentang pemahaman fungsi keluarga dan peningkatan kerjasama lintas sektor dalam upaya meningkatkan fungsi dan peran keluarga.

**5. Penguatan Regulasi, Kelembagaan, serta Data dan Informasi**, yang dilakukan melalui strategi:

a. Mengharmonisasikan dan mengusulkan amandemen peraturan perundangan agar lebih mendukung pelaksanaan program KB (Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 agar selaras dengan Undang - undang Nomor 52 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan);

b. Peningkatan koordinasi dalam implementasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 terutama pada Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

c. Penguatan Kelembagaan melalui bimbingan teknis dan pemantauan pembentukan Dinas Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di masing-masing wilayah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dengan landasan hukum pelaksanaan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

d. Penyerasian dan peninjauan kembali landasan hukum/peraturan perundang -undangan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

e. Koordinasi terpadu lintas sektor (lintas kementerian/lembaga) terkait perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Kegiatan Program KKBPK (misal: Kegiatan Kampung KB);

f. Peningkatan koordinasi perumusan kebijakan Pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (misal: melalui forum Musrenbangda dan Musrenbangnas);



- g. Peningkatan kualitas data dan informasi Program KKBPK yang akurat dan tepat waktu;
- h. Peningkatan diseminasi, aksesibilitas dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan terutama sensus dan survei bagi seluruh pihak, termasuk swasta dan akademisi;
- i. Peningkatan koordinasi, termasuk fasilitasi seluruh instansi dalam pemanfaatan data dan informasi kependudukan untuk perencanaan dan evaluasi kebijakan pembangunan.

### **3.3 Kerangka Regulasi**

Kerangka Regulasi disusun dalam rangka mewujudkan arah Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) tahun 2015-2019 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga, adalah terwujudnya konsistensi Kebijakan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan tujuan:

1. Mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dengan memperhitungkan daya dukung lingkungan.
2. Meningkatkan kualitas keluarga (keluarga berkualitas) sehingga tercipta rasa aman, tentram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin dengan melembagakan dan membudayakan Norma Keluarga Kecil, Bahagia, dan Sejahtera (NKKBS).
3. Meningkatkan upaya mengatur kelahiran anak, jarak, usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui: promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas.
4. Menyediakan data dan informasi keluarga untuk digunakan oleh Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai dasar penetapan kebijakan, penyelenggaraan, dan pembangunan.

Ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi tugas dan tanggung jawab

pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, kebijakan keluarga berencana, penyelenggaraan sistem informasi keluarga, pemantauan dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, serta pendanaan.

Fokus penetapan Kebijakan Nasional Perkembangan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga diarahkan untuk:

- a. Menjamin tercapainya penurunan TFR sesuai target yang ditetapkan;
- b. Meningkatkan kualitas penduduk dengan memanfaatkan bonus demografi;
- c. Memberdayakan penerapan fungsi-fungsi keluarga; dan
- d. Memperkuat semangat gotong royong berbasis keluarga.

Pemerintah juga menetapkan program dan kegiatan penyelenggaraan pengendalian kuantitas penduduk berkaitan dengan:

- a. Perencanaan kependudukan;
- b. Penyediaan parameter kependudukan;
- c. Analisis dampak kependudukan;
- d. Kerjasama pendidikan kependudukan; dan
- e. Penanganan isu-isu kependudukan di daerah provinsi, kabupaten dan kota.

Hal tersebut di atas dilaksanakan dengan cara memberikan pembinaan dan pemenuhan pelayanan kepada masyarakat melalui advokasi, KIE, serta penyediaan sarana dan prasarana Program KKBPK. Penyelenggaraan pengendalian kuantitas penduduk dilakukan untuk melembagakan dan membudayakan NKKBS yang dilakukan melalui Penyelenggaraan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Pemerintah menetapkan kebijakan nasional pembangunan keluarga yang diarahkan untuk:

- a. Melembagakan dan membudayakan NKKBS;
- b. Memberdayakan fungsi keluarga;
- c. Memandirikan keluarga;
- d. Memberdayakan kearifan lokal;

- e. Meningkatkan kualitas seluruh siklus hidup;
- f. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat; dan
- g. Memberdayakan peran serta masyarakat.

Kedudukan serta tugas dan fungsi Penyuluh KB (PKB/PLKB) tertuang dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, dimana pengelolaan Penyuluh KB (PKB/PLKB) merupakan kewenangan pemerintah Pusat (dalam hal ini adalah BKKBN), dan pendaayagunaannya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam implementasinya, selain harus mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, juga diperlukan pedoman spesifik yang lebih operasional, mulai dari penetapan standar kompetensi penyuluhan KB, penetapan Lembaga Sertifikasi Profesi Penyuluh KB sampai pada strategi dan prosedur pelaksanaannya termasuk pembentukan asesor dan lembaga diklat terakreditasi di provinsi.

Standardisasi tenaga pelayanan KB bagi petugas medis berkaitan dengan prosedur, tata cara dan kewenangan teknis medis memerlukan regulasi dan kerjasama dengan sektor/institusi terkait, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar dalam lima tahun ke depan. Dengan demikian, kerangka regulasi penyelenggaraan urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB selama lima tahun ke depan adalah:

1. Perubahan Peraturan Presiden tentang kelembagaan BKKBN terutama terkait dengan penambahan fungsi tidak hanya yang tertera pada Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tetapi juga melaksanakan tugas fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang dalam lampiran dinyatakan bahwa Kewenangan Pemerintah dalam hal ini BKKBN meliputi:
  - a) Pengendalian Penduduk;
    - Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk.
    - Penetapan perkiraan pengendalian penduduk secara nasional.
  - b) Keluarga Berencana (KB);

- Penyusunan desain program dan pengelolaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian penduduk.
  - Pengelolaan Tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB).
  - Pengelolaan dan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk kebutuhan PUS nasional.
  - Pengelolaan dan pengendalian sistem informasi keluarga.
  - Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dalam pengendalian pelayanan dan pembinaan kesertaan ber- KB.
- c) Keluarga Sejahtera;
- Pengembangan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
  - Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dalam pembangunan keluarga melalui ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- d) Standardisasi dan Sertifikasi meliputi Standardisasi pelayanan KB dan sertifikasi tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB).
2. Penetapan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Keluarga Berencana sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 tentang perkembangan Kependudukan, Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga.
  3. Harmonisasi dan sinkronisasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian terkait dalam penerapan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, seperangkat peraturan perundangan yang berkaitan dengan kelembagaan pengendalian penduduk dan KB di daerah provinsi dan kabupaten/kota, serta petunjuk teknis tentang nomenklatur, struktur dan tugas fungsi lembaga di daerah yang menangani Program KKBPK.
  4. Penetapan peraturan Kepala BKKBN terutama dalam menerapkan Norma Standard Prosedur dan Kriteria (NSPK) program dan kegiatan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana di daerah provinsi dan kabupaten/kota.

5. Penetapan peraturan Kepala BKKBN terutama dalam perincian program dan kegiatan serta penganggaran di kabupaten/kota sebagai rujukan daerah dalam menerapkan struktur program dan kegiatan, indikator per kegiatan kependudukan dan KB sekaligus kode akun anggaran.
6. Penetapan peraturan Kepala BKKBN terutama dalam menerapkan Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga secara nasional dan di daerah.
7. Penetapan peraturan Kepala BKKBN terutama dalam menerapkan standardisasi pelayanan KB kepada tenaga Pelayanan KB.
8. Penetapan peraturan Kepala BKKBN terutama dalam menerapkan pengelolaan tenaga Penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB.
9. Penetapan peraturan Kepala BKKBN terutama dalam menerapkan sertifikasi tenaga penyuluh KB.
10. Penetapan peraturan Kepala BKKBN terutama dalam menerapkan peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi dengan Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dan kementerian terkait terutama dalam penerapan peraturan perundangan yang berlaku.
11. Penyusunan regulasi untuk mendukung pencapaian sasaran program KB di daerah, antara lain untuk mendukung pencapaian peserta KB Baru, pembinaan peserta KB aktif, kedudukan operasional penyuluh KB, penyaluran anggaran mekanisme operasional dan penggerakan KB, distribusi alokasi dari kabupaten/kota ke fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes), serta insentif bagi tenaga lapangan KB.

Rincian kerangka regulasi dapat dilihat pada Lampiran II: Matriks Kerangka Regulasi.

### **3.4 Kerangka Kelembagaan**

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, ditetapkan bahwa Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Untuk itu diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan yang menangani penyelenggaraan urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB di tingkat provinsi, dan kabupaten/kota

agar dapat sepenuhnya mengacu pada ketentuan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan Pengendalian Penduduk dan KB sebagaimana telah ditetapkan di dalam RPJMN dan Renstra BKKBN 2015-2019. Selain itu, dengan adanya bentuk kelembagaan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB maka akan memudahkan saat penyusunan Program, Indikator dan Kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB baik di dalam RPJMD, Renstrada, dan RKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka perlu dilakukan penguatan fasilitasi, sosialisasi, pendampingan dan pembinaan, terutama dalam menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Dalam rangka penguatan kelembagaan Pengendalian Penduduk, KB, dan Pembangunan Keluarga diperlukan beberapa langkah kegiatan, diantaranya:

1. Penguatan kapasitas pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB, minimal berkaitan dengan;
  - a) Penguatan kapasitas yang berkaitan dengan kedudukan, fungsi, klasifikasi lembaga daerah yang menangani pengendalian penduduk dan KB.
  - b) Penguatan kapasitas infrastruktur regulasi yang mendukung operasional maupun eksistensi lembaga sebagai tindak lanjut perubahan peraturan perundangan (peraturan daerah, peraturan Bupati/Walikota atau regulasi lain) yang berfungsi menjaga kualitas dan sinergitas kebijakan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi program.
  - c) Penguatan kompetensi/kapasitas sumber daya manusia baik tenaga pengelola Program, tenaga pelaksana maupun tenaga masyarakat yang menyelenggarakan Program KKBPK sesuai tingkatan wilayah.
  - d) Penguatan program dan penguatan kegiatan sebagai tindak lanjut penerapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) program KKBPK sebagai penetapan arah Kebijakan umum pembangunan di

daerah, Renstrada dan Rencana Kegiatan dan Anggaran SKPD pembangunan pengendalian penduduk dan KB.

- e) Penguatan kapasitas dukungan sarana, prasarana dan anggaran untuk menyelenggarakan program KKBPK di kabupaten/kota, kecamatan dan desa dalam upaya menjaga kesinambungan dan keberlangsungan pelayanan pengendalian penduduk dan KB kepada masyarakat.
2. Menyelenggarakan sistem informasi keluarga yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendataan Keluarga, pencatatan dan pelaporan pelayanan kontrasepsi dan pencatatan dan pelaporan pengendalian lapangan program KKBPK secara akurat dan tepat waktu.
3. Memperkuat kedudukan dan peran penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB terutama berkaitan dengan pengelolaan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun tenaga non ASN yang didayagunakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota serta pelaksanaan sertifikasi penyuluh KB;
4. Memperkuat kedudukan hukum PPKBD, SUB PPKBD dan kader KB sebagai penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di dalam Pasal 150 dinyatakan bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa dibentuk atas prakarsa pemerintah desa dan masyarakat khususnya yang bertugas untuk melakukan pemberdayaan masyarakat desa, berperan serta aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan melakukan pelayanan Program KKBPK secara langsung kepada masyarakat.
5. Memperkuat pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pengendalian pelayanan/pembinaan kesertaan ber-KB serta dalam pembangunan keluarga melalui ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
6. Memperkuat pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di kabupaten/kota.

## **BAB IV**

### **TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

#### **4.1. TARGET KINERJA**

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga (K/L) 2015-2019, maka Perwakilan BKKBN Provinsi Riau menyusun Renstra 2015-2019 dengan target kinerja dan kerangka pendanaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Penyusunan Renstra Perwakilan BKKBN Riau 2015-2019 mengacu pada sasaran program (outcome), sasaran kegiatan (output) dan indikator-indikator yang telah tertuang di dalam RPJMN 2015-2019. Kemudian pengembangan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Komponen dan Sub Komponen juga harus mempertimbangkan upaya perwujudan tujuan Perwakilan BKKBN Provinsi Riau sebagai perpanjangan keweang BKKBN Republik Indonesia yaitu untuk “mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang melalui upaya penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan perwujudan Keluarga Berkualitas”. Selain itu, dalam penyempurnaan Renstra ini, Perwakilan BKKBN Provinsi Riau juga memperhatikan berbagai prioritas pembangunan yang telah dirumuskan di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017.

##### **4.1.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis**

Sasaran Strategis Perwakilan BKKBN Provinsi Riau adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Riau mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya *outcome* dari beberapa program. Bentuk penjabaran tujuan strategis tersebut, Perwakilan BKKBN Provinsi Riau menetapkan Sasaran Strategis Tahun 2015-2019 sebagai berikut:

1. Menurunnya Angka kelahiran total (TFR)
2. Meningkatnya prevalensi kontrasepsi (CPR)
3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)



4. Meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
5. Menurunnya Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Perwakilan BKKBN Provinsi Riau Tahun 2015-2019, maka BKKBN menetapkan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Indikator Kinerja Sasaran Strategis BKKBN Tahun 2015-2019**

Indikator		Baseline Target 2014	Target kinerja					2015 – 2019
			2015	2016	2017	2018	2019	
1.	Angka kelahiran total (otal fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)	2,9	2,82	2,74	2,66	2,58	2,5	2,5
2	Prosentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive rate/CPR)	54,1	55,1	56,1	57,1	58,1	59,1	59,1
3	Prosentase Kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	11,8 (9,1)	11,0	10,2	9,4	8,6	7,8	7,8
4	Prosentase Peserta KB Aktif (PA) MKJP	8,5	10	11,5	14	15,5	18	18
5	Tingkat Putus Pakai	27,1	26,0	25,7	25,3	25,0	24,6	24,6

#### 4.1.2 Sasaran Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Program

Sasaran Program (Outcome) merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian sasaran strategis Perwakilan BKKBN Provinsi Riau Tahun 2015-2019. Perwakilan BKKBN Provinsi Riau merupakan Lembaga Perwakilan di Provinsi di bawah BKKBN Republik Indonesia sehingga hanya mempunyai 1 (satu) Program Teknis yaitu Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta 3 (tiga) Program Generik yaitu: 1) Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan; 2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya; 3) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN.

## **1. Sasaran Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)**

Sasaran Program (Outcome) Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga adalah Meningkatnya Program KKBPK diseluruh tingkatan wilayah. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian hasil (outcome), maka ditetapkan Indikator Kinerja Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga sebagai berikut:

- Jumlah peserta KB baru /PB
- ASFR 15-19 Tahun
- Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern
- Persentase keluarga yang memiliki pemahaman dan kesadaran tentang fungsi keluarga
- Indeks Pengetahuan remaja tentang Generasi Berencana
- Persentase masyarakat yang mengetahui tentang isu kependudukan
- Jumlah ketersediaan data dan informasi keluarga (pendataan keluarga) yang akurat dan tepat waktu

## **2. Sasaran Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Perwakilan BKKBN Provinsi Riau**

Sasaran Program (Outcome) Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Perwakilan BKKBN Provinsi Riau adalah meningkatnya kualitas SDM Aparatur pengelola Program, Kerjasama Internasional serta Penelitian dan Pengembangan program KKBPK. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian hasil (outcome), maka ditetapkan Indikator Kinerja Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan

sebagai berikut:

- Persentase peningkatan kualitas SDM Pengelola Program KKBPK.
- Menjadikan Lembaga Diklat yang terakreditasi

- Jumlah kerjasama antara latbang Perwakilan BKKBN Provinsi Riau dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi di bidang KKBPK
- Indeks Kepuasan hasil pelatihan dan pengembangan , penelitian dan pengembangan KB, KS dan Kependudukan

### **3. Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Perwakilan BKKBN Provinsi Riau**

Sasaran Program (Outcome) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya adalah terwujudnya dukungan manajemen dalam rangka penyelenggaraan Program KKBPK. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian hasil (outcome), maka ditetapkan Indikator Kinerja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya sebagai berikut:

- Jumlah produk hukum dan kebijakan yang dapat dipergunakan sebagai dasar penguatan pelaksanaan program pengendalian penduduk dan KB
- Tingkat opini laporan keuangan oleh BPK
- Jumlah dokumen perencanaan Program dan Anggaran yang mengacu pada pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu dan berbasis kinerja
- Persentase terlaksananya pengembangan karir Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kompetensinya sesuai dengan standar (sesuai roadmap)
- Indeks kepuasan pelayanan administrasi perkantoran, kerumahtanggaan, dan pemeliharaan sarana prasarana perkantoran
- Jumlah Dukungan manajemen pengelolaan program Kependudukan, KB serta Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Provinsi

### **4. Sasaran Program Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Perwakilan BKKBN Provinsi Riau**

Sasaran Program (Outcome) Pengawasan dan Peningkatan

Akuntabilitas Aparatur BKKBN adalah meningkatnya akuntabilitas pengelolaan Program KKBPK. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian hasil (outcome), maka ditetapkan Indikator Kinerja Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN sebagai berikut:

- Persentase Temuan Penyimpangan Strategis dalam Pelaksanaan Pengelolaan Program KKBPK oleh eksternal audit
- Jumlah pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur di satker Perwakilan BKKBN provinsi

#### **4.1.3 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan**

Sasaran Kegiatan adalah keluaran (output) yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran program. Sasaran kegiatan merupakan keluaran yang harus dihasilkan oleh unit kerja Eselon II dengan alat ukur tingkat keberhasilan pencapaiannya menggunakan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Sasaran Kegiatan (Output) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) untuk masing-masing unit kerja Eselon II telah disusun untuk seluruh Program dan Bidang di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Riau (tertera pada matrik lampiran Renstra ini).

## **4.2. KERANGKA PENDANAAN**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L), Pemerintah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara. Dokumen penyusunan anggaran yang dibutuhkan sebelum APBN ditetapkan oleh Pemerintah dan DPR, adalah RKA/KL dan Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara (RDP BUN). RKA-K/L merupakan dokumen rencana keuangan tahunan K/L yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga, sedangkan RDP BUN adalah rencana kerja dan anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang memuat rincian kebutuhan dana baik yang berbentuk

anggaran belanja maupun pembiayaan dalam rangka pemenuhan kewajiban pemerintah pusat dan transfer kepada daerah yang pengelolaannya dikuasakan oleh Presiden kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 juga mengatur bahwa penyusunan RKA-K/L harus menggunakan pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM), penganggaran terpadu (unified budgeting) dan penganggaran berbasis kinerja (PBK).

#### 4.2.1. Pendanaan Sasaran Strategis

Sasaran Strategis merupakan sasaran yang harus dapat dicapai oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Riau melalui integrasi dan sinkronisasi berbagai kegiatan prioritas di seluruh Program, Bidang (Unit Eselon II) dan seluruh unit kerja Eselon III di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Riau. Sehingga kerangka pendanaan Sasaran Strategis merupakan alokasi anggaran Perwakilan BKKBN Provinsi Riau secara keseluruhan (total anggaran Perwakilan BKKBN Provinsi Riau).

#### 4.2.2. Pendanaan Program dan Indikator Kinerja Program

Kerangka pendanaan Program di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Riau dibagi pada 4 (empat) Program yang terdiri dari:

**Tabel 4.6**  
Alokasi Pendanaan Sasaran Strategis 2015-2019

(dalam ribu Rupiah)

No.	INDIKATOR	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga	16,515,520	25,774,861	26,972,340	35,197,670	38,797,670	42,397,670
2	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKKBN	13,532,960	14,093,685	15,656,147	17,991,911	18,891,507	19,836,082
3	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN	50,000	100,000	127,000	135,000	141,750	148,838
4	Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta kerjasama Internasional BKKBN	2,822,655	4,625,800	4,539,419	4,569,410	4,797,881	5,037,775

#### **4.2.3 Pendanaan Bidang dan Kegiatan**

Di dalam Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) terdapat 4 (empat) Bidang: Bidang Pengendalian Penduduk (DALDUK), Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR), Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) dan Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi (ADPIN). Pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DKM) terdapat 1 (satu) Sekretariat, pada Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur terdapat 1 (satu) sub bagian Administrasi Pengawasan yang secara struktur berada di bawah Sekretariat, dan pada Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional terdapat 1 (satu) Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan (Latbang).

Pada masing-masing Bidang tersebut kemudian telah dijabarkan pada level kegiatan (unit kerja Eselon IV). Pendanaan pada level kegiatan merupakan anggaran untuk mendukung keluaran (output) yang dihasilkan oleh unit kerja Eselon IV yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran Program dan Bidang di atasnya. Rincian kerangka pendanaan per-Bidang (unit Eselon III) dan per-Kegiatan Prioritas (unit kerja Eselon II) telah tertera pada matrik lampiran Renstra ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Upaya penguatan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang tergambar pada kondisi pencapaian Program KKBPK Provinsi Riau selama lima tahun terakhir dimana target/sasaran yang telah ditetapkan belum berhasil dicapai secara maksimal. Perwakilan BKKBN Provinsi Riau harus lebih meningkatkan komitmen dalam pelaksanaan berbagai kegiatan prioritas baik secara internal di dalam lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Riau sendiri, maupun dengan meningkatkan kerjasama lintas sektor serta bersama mitra kerja dan pemangku kepentingan (stakeholders) di seluruh tingkatan wilayah baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota.

Perbaikan telah dilakukan di dalam Rencana Strategis (Renstra) Perwakilan BKKBN Provinsi Riau 2015-2019 ini dengan telah mempertimbangkan berbagai perkembangan isu dan lingkungan strategis serta kebijakan perencanaan yang telah diantaranya; 1) Perubahan pendekatan yang semula *Money Follow Function* menjadi *Money Follow Program*, 2) Pendekatan Perencanaan pembangunan nasional yang holistik, tematik, terintegrasi, dan spasial, dan 3) Penajaman Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Nasional dalam RKP 2017.

Selain itu, penyempurnaan pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Komponen dan Sub Komponen pada Renstra ini juga telah dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan perbaikan dan penajaman pada *Balanced Score Card* (BSC) Perwakilan BKKBN Provinsi Riau 2015 – 2019 yang akan menjadi salah satu alat ukur atau alat pemantauan dan evaluasi terhadap upaya pencapaian target/sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan adanya perbaikan/revisi pada Rencana Strategis (Renstra) Perwakilan BKKBN Provinsi Riau 2015-2019 ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas implementasi Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) diseluruh tingkatan wilayah di Provinsi Riau, dapat memperkuat strategi pelaksanaan kegiatan prioritas dalam pencapaian target/sasaran yang telah

ditetapkan, serta dapat memudahkan proses evaluasi pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja/outcome dan output pada Perwakilan BKKBN Provinsi Riau. Berbagai permasalahan yang kemudian muncul dalam proses pelaksanaan Program dan Kegiatan Perwakilan BKKBN Provinsi Riau kedepan merupakan tantangan bersama yang harus dihadapi melalui berbagai strategi yang dapat dikembangkan.







